

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan teori**

##### **2.1.1 Teori Stewardship**

*Grand theory* penulisan ini merupakan bagian dari teori keagenan, *the stewardship theory*. Dalam karyanya, Donaldson (1997) menemui faktor yang berbeda antara hipotesis kantor dan hipotesis penatalayanan. Teori manajemen menggambarkan situasi di mana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi diarahkan menuju hasil yang pasti untuk mendukung asosiasi. Teori ini mengandaikan hubungan kuat antara kepuasan serta keberhasilan asosiasi. Keberhasilan asosiasi mencerminkan maksimal kegunaan dewan direksi serta kelompok manajemen. Memaksimalkan kebermanfaatan kelompok akhirnya akan memaksimalkan minat orang-orang dalam pertemuan hierarkis.

Dalam teori keagenan, terdapat hubungan antara orang yang memiliki modal dengan agen yang merupakan pengelola manajemen, dan masing-masing memiliki berbagai manfaat yang menguntungkan diri sendiri, tetapi dalam teori manajemen, Manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu. Kepentingan utama mereka dalam organisasi lebih terfokus pada hasil yang diharapkan.

Pemerintahan para eksekutif diharapkan menawarkan jenis bantuan (berjalan sebagai pelayan) untuk kepentingan kepala. Menurut Akbar (2019), pemerintah ada berkat rakyat, dan tanpa masyarakat pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik. Kita bisa mengatakan bahwa masyarakat adalah raja karena

pemerintah mengatur masyarakat pada hakekatnya menurut norma hukum, tetapi masyarakat mempunyai hak atas pelayanannya.

Kaitannya sama pendapatan daerah yaitu bahwa daerah sendiri dari Pendidikan dan infrastruktur yang sumbernya berasal dari pendapatan daerah bias berkembang. Sumber pendapatan lokal adalah daerah setempat itu sendiri. Masyarakat membayar sebagian pendapatannya kepada pemerintah. Tetapi ketika membayar pajak, orang tidak saling diuntungkan. Karena pajak adalah kewajiban individu untuk membayar pemerintah beberapa produk kekayaan. Kaitan dalam penelitian ini adalah di mana pemerintah dapat sepenuhnya melayani rakyatnya. Implikasi *theory stewardship* terhadap penelitian ini adalah tujuan perekonomian daerah bisa tercapai, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara optimal (Sudaryo, 2017).

### **2.1.2 Pendapatan Daerah**

Menurut UU 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memerlukan kekuatan dan kapasitas untuk menyelidiki sumber dana territorial itu sendiri, didukung penuh oleh perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan daerah tercantum dalam peraturan No. 33 Tahun 2004 tentang keselarasan moneter antara pemerintahan pusat dan daerah, khususnya hak pemerintah daerah untuk ditambahkan nilai kekayaan bersih periode berjalan.

Menurut Husna (2015), pendapatan daerah adalah total penerimaan pendapatan kas daerah didapatkan dari kemampuan wilayah tersebut. Pemerintah memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya sehingga sumber-sumber

keuangan daerahnya dapat tergali. pendapatan daerah ini akan masuk dan menambah dana daerah dan menjadi hak milik daerah dalam satu tahun anggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan terkait pelaksanaan otonomi daerah berasal dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman dan pemerintah daerah lainnya yang sah.

#### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan pedoman yang ada di daerah sesuai dengan pedoman hukum. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, bagi hasil BUMD, pendapatan badan, dan pendapatan lainnya (BPS Kab. Purbalingga).

PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah dan biaya tambahan, dan PAD lainnya yang sah sesuai dengan peraturan hokum yang berlaku (Sanga, 2018). Oktari., (2014) menjelaskan bahwa salah satu indikator daerah mandiri adalah pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah, maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil. Dalam survei Lestari (2016), Halim menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua pendapatan yang didapat dari sumber yang ada didalam daerah, yang dikumpulkan berdasarkan pedoman provinsi sesuai peraturan dan pedoman yang relevan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah salah satu pendapatan paling penting yang digunakan dalam

keuangan daerah, dan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah. APBD. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dukungan pemerintah pusat.

#### **2.1.2.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Jadi sumber penerimaan ini digali sesuai kemampuan dan potensi dari masing-masing daerah. Adapun sumber pendapatan daerah yaitu:

##### **a. Pajak daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok kepada daerah tanpa kompensasi langsung yang berimbang, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

##### **b. Retribusi daerah**

Mengingat peraturan no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai angsuran bagi pemerintahan atau pemberian izin khusus yang diberikan secara tegas serta diberikan oleh pemerintah provinsi untuk menunjang rakyat atau unsur.

##### **c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan daerah yang terisolasi merupakan hasil pengelolaan aset yang terpisah dari administrasi rencana keuangan pemerintah dan konsumsi lokal. Rani (2016) menjelaskan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari jenis pendapatan ini, mengikuti strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti bagi hasil, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan jasa. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah meliputi pendapatan dari penjualan aset daerah, pendapatan dari giro, pendapatan dari kompensasi aset lokal, pembayaran deposito kepada pihak ketiga yang berlebihan, dan keterlambatan pekerjaan lokal. Terdiri dari penghasilan dari denda pelaksanaan, denda pajak penghasilan, dan sebagainya. Santunan denda, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran, pendapatan dari pemenuhan jaminan, pendapatan dari retur, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang ditunjukkan oleh buku Davey Damas (2017), pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah dengan pengaturan dari masing-masing wilayah tertentu.
- b. Pajak dipungut menurut peraturan yang berlaku, tetapi tarif pajak ditentukan oleh pemerintahan.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah.
- d. Dikumpulkan dan dikuasai oleh pemerintah pusat, namun hasil pemungutannya diberikan, dibagi, atau ditagih oleh pemerintah daerah untuk pajak tambahan.

Menurut Ramadhan (2019), pajak pada umumnya dipungut oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan pedoman-pedoman yang bisa dipungut dan wajib dibayar oleh mereka yang wajib membayar tanpa memperoleh kembalian secara langsung, pengembaliannya digunakan untuk mendanai belanja negara di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Dari uraian tersebut, pemungutan pajak daerah atas masyarakat oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk mendanai pelaksanaan misi pemerintahan, pembangunan dan pengembangan masyarakat secara efisien dan berhasil guna meningkatkan biaya hidup masyarakat. bertujuan untuk.

#### **2.1.3.2 Ciri – Ciri Pajak Daerah**

Sesuai buku Kaho Damas (2017), ciri-ciri yang terkait dengan pajak daerah adalah:

- a. Pajak daerah timbul dari pajak negara yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.

- b. Pengajuan dibuat sesuai dengan hukum.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah dengan mempertimbangkan kekuatan hukum serta pedoman hukum lainnya.
- d. Konsekuensi dari pemilihan tarif pajak dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah atau untuk mendanai belanja daerah sebagai badan hukum politik.

### **2.1.3.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 ada beberapa jenis pajak daerah diantaranya yaitu:

(1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok.

(2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan Jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

#### **2.1.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Seperti yang tercantum dalam kamus istilah ekonomi, pengeluaran adalah pembayaran untuk kewajiban masa depan yang sedang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, dan jika dilakukan untuk meningkatkan aset tetap, pengeluaran itu operasional. Bila dilakukan untuk pengeluaran, itu disebut belanja modal, pengeluaran disebut belanja modal. Termasuk biaya operasi, barang, jasa, atau biaya tunai untuk mendapatkan kinerja. Pengeluaran pemerintah diukur dengan besarnya pengeluaran daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, seluruh belanja daerah bersumber dari rekening keuangan umum daerah, yang tidak dibayar kembali oleh pemerintah dan mengurangi saldo kelebihan anggaran untuk periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Devi (2019), pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah untuk produk modal, pemanfaatan tenaga kerja dan produk. Adapun penjelasan dari Gritno dalam survei Irrawati (2018), pengeluaran pemerintah mencerminkan strategi otoritas publik itu sendiri. Dengan asumsi otoritas publik memulai pengaturan khusus untuk perolehan tenaga kerja dan produk, pengeluaran pemerintah menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pendekatan tersebut. Sangat penting peran dari pemerintah untuk mengatur hubungan sosial, pendidikan, rekreasi dan budaya. Sementara itu, menurut Anggraeni dalam survei Akbar (2019), pendapatan nasional yang lebih



tinggi dapat menyebabkan pendapatan pemerintah yang lebih tinggi dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi.

#### **2.1.4.2 Jenis Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Devi (2019) ada beberapa jenis pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Pengeluaran rutin atau belanja operasi

Belanja rutin adalah belanja yang digunakan untuk mendanai pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah, antara lain belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja harian lainnya. adalah. Anggaran dari pengeluaran sehari-hari ini tidak hanya mendukung berjalannya sistem pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

b. Pengeluaran pembangunan atau belanja modal

Biaya pembangunan digunakan untuk menghimpun dana pembangunan baik berupa pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan non fisik yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk memajukan kegiatan daerah di berbagai bidang seperti ekonomi, kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Pengeluaran yang digunakan untuk. Dana anggaran pembangunan fisik dan non fisik selalu disesuaikan dan dialokasikan ke daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut sifatnya pengeluaran pemerintah adalah :

- a. Belanja *self liquidating* adalah belanja negara yang akan dilunasi seluruhnya oleh pihak yang akan mendapatkan tenaga kerja dan produk yang disediakan otoritas di masa yang akan datang.
- b. Belanja non *self liquidating* adalah konsumsi pemerintah yang menambah keceriaan dan tidak mendapatkan angsuran kembali dari daerah. Contohnya, belanja negara untuk membuat ruang publik di wilayah metropolitan.
- c. Pengeluaran semi *self liquidating* adalah belanja negara yang menerima penggantian dari masyarakat umum, namun tidak relatif terhadap, misalnya, jumlah belanja negara yang dibuat untuk tugas-tugas proyek dan biaya pemeliharaan, tetapi tetap memberikan subsidi finansial. Saya menerima dari pemerintah.

#### **2.1.4.3 Tujuan Pengeluaran Pemerintah**

Tujuan pengeluaran pemerintah adalah :

- a. Pengeluaran untuk investasi pada dasarnya adalah pengeluaran pemerintah jangka panjang, karena dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan ekonomi dikemudian hari.
- b. Belanja kesejahteraan rakyat adalah belanja yang bisa dirasakan langsung oleh daerah dan memperluas derajat bantuan pemerintah.
- c. Dari segi waktu sekarang, pengeluaran untuk tabungan masa depan sepertinya hanya membuang-buang pengeluaran pemerintah ini, tetapi jika pengeluaran tersebut tidak dilakukan, negara untuk masa depan, misalnya pemberantasan narkoba, akan menambah pengeluaran anda.

- d. Pengeluaran untuk meningkatkan lapangan kerja dan daya beli bersama dengan belanja negara mendorong minat tenaga kerja dan produk serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan daya beli. Misalnya belanja negara buat kemajuan dan belanja negara sebagai kompensasi.

## **2.1.5 Inflasi**

### **2.1.5.1 Pengertian Inflasi**

Menurut BPS, inflasi secara umum cenderung menaikkan biaya tenaga kerja dan produk secara berkelanjutan. Inflasi naik karena biaya tenaga kerja dan produk dalam negeri meningkat. Ekspansi dalam biaya tenaga kerja dan produk bertujuan pengurangan nilai uang tunai. Oleh karena itu, inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang dibandingkan dengan nilai tenaga kerja dan produk umum.

Menurut Husna (2015), inflasi cenderung merupakan kenaikan harga secara konsisten. Peningkatan harga beberapa produk tidak disebut inflasi kecuali jika kenaikan tersebut menyebabkan sebagian besar biaya produk yang berbeda. Inflasi bisa disebabkan karena permintaan masyarakat terhadap berbagai produk terlalu kuat. Inflasi ini disebut inflasi permintaan. Inflasi juga dapat terjadi karena biaya pembuatan diperluas. Inflasi ini disebut inflasi biaya.

Inflasi pada umumnya merupakan kondisi perekonomian suatu negara yang berkembang sangat pesat dari yang dibutuhkannya. Inflasi juga dapat terjadi ketika kelompok ekonomi yang berbeda berusaha untuk memperoleh pendapatan relatif tambahan yang lebih besar dari keuntungan produktivitas. Dan jika terlalu bersemangat ekspektasi (ekspektasi) menyebabkan lonjakan permintaan barang

dan jasa dibandingkan dengan peningkatan produksi yang mungkin dapat dicapai perekonomian, atau ini karena efek dari berbagai faktor yang ada. Jika dipicu. Akibatnya harga akan naik signifikan (Awianti, 2020).

Selama inflasi, tidak semua harga naik pada tingkat yang sama, dan mereka jarang naik pada tingkat yang sama. Menurut Lestari (2016), harga yang diukur dengan indeks harga berada pada level normal selama periode inflasi. Kenaikan indeks harga berarti inflasi. Jika indeks harga turun atau negatif, berarti telah terjadi deflasi.

#### **2.1.5.2 Jenis Inflasi**

Ada beberapa jenis penyebab inflasi. Menurut Sukirno (2005), inflasi biasanya dibagi menjadi tiga struktur berdasarkan penyebab atau alasan kenaikan biaya :

- a. Ekspansi tarikan permintaan. Ekspansi ini biasanya terjadi ketika ekonomi sedang tumbuh dengan cepat. Kemudian kesempatan kerja yang luar biasa akan menciptakan gaji yang sangat besar, pada gilirannya menyebabkan pengeluaran yang melampaui kapasitas keuangan untuk memberikan tenaga kerja dan produk. Pengeluaran yang berlebihan menyebabkan inflasi.
- b. Ekspansi dorongan biaya. Ekspansi ini juga terjadi ketika ekonomi tumbuh dengan cepat ketika rendahnya tingkat pengangguran.
- c. Ekspansi impor. Ekspansi terjadi ketika impor mengalami peningkatan biaya memegang bagian terpenting dalam aktivitas pembelian suatu perusahaan. Misalnya, kenaikan harga minyak.

## 2.2 Penelitian terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan penelitian ini, yaitu :

**Gambar 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Provinsi Aceh  Mayza (2015)	(X) : Jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan inflasi  (Y) : Pendapatan asli Daerah	Jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan rasio (pengeluaran pemerintah / PDRB) berpengaruh terhadap PAD
2.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (studi kasus di Kabupaten / Kota eks-Karesidenan Pekalongan periode 2005-2014)  Rani (2016)	(X) : Pengeluaran pemerintah, PDRB, dan jumlah penduduk  (Y) : Pendapatan asli Daerah	Pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh terhadap PAD  Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Samarinda  Lestari (2016)	(X) : PDRB, investasi swasta, inflasi  (Y) : Pendapatan asli Daerah	PDRB berpengaruh terhadap PAD Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD di tolak Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD di tolak
4.	Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) ( studi kasus pada DPPKAD, BAPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015)  Hendriyani (2017)	(X) : Pengeluaran Pemerintah, Jumlah penduduk, inflasi  (Y) : Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD, sedangkan Pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
5.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Kediri (berdasarkan tahun 2000-2014)  Mauliana (2017)	(X) : PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi  (Y) : Pendapatan asli Daerah	PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD  Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
6.	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli	(X) : Pajak daerah,	Pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama tidak

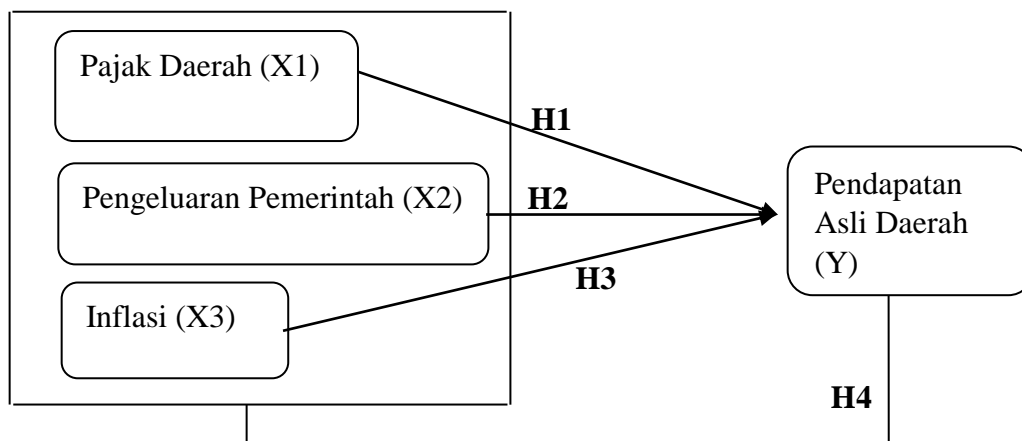
	daerah Kabupaten Sikka  Sanga (2018)	retribusi daerah  (Y) : Pendapatan asli Daerah	berpengaruh terhadap PAD
7.	Pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota se eks karesidenan Kediri  Devi (2019)	(X) : PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah  (Y) : Pendapatan asli Daerah	PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota se eks karesidenan Kediri
8.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (studi kasus di Kabupaten dan Kota se-eks Karesidenan Surakarta  Sari (2019)	(X) : PDRB, jumlah penduduk, inflasi  (Y) : Pendapatan asli Daerah	PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi berpengaruh terhadap PAD
9.	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara  Saputri (2019)	(X) : Pajak daerah, retribusi daerah  (Y) : Pendapatan asli Daerah	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
10.	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara  Ramadhan (2019)	(X) : Pajak daerah, retribusi daerah  (Y) : Pendapatan asli Daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama berpengaruh terhadap PAD

### 2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari arah teori dalam memberikan solusi dari permasalahan secara sistematis. Adapun skema dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. 2

## Kerangka Penelitian



## 2.4 Hipotesis

Kerangka konseptual menjelaskan arah teori dalam memberikan solusi masalah secara sistematis. Skema penelitian ini adalah sebagai berikut: Hipotesis adalah pernyataan tentang keadaan sebenarnya dari populasi yang ingin diuji, berdasarkan data yang diambil dari sampel survei (Muhammad, 2019). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan rumusan masalah yang ada, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan mempunyai peran penting yang bersumber dari daerah itu sendiri. Karena semakin tinggi pendapatan daerah yang dipungut, maka semakin tinggi pula pendapatan masyarakat sekitar. Karena pengeluaran disekitar adalah salah satu sumber pendapatan pajak lokal, peningkatan pajak disekitar akan mempengaruhi

peningkatan pendapatan penilaian terdekat. Hasil penelitian Saputri (2019), Devi (2019) dan Ramadhan (2019) mengatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis kesatu berdasarkan uraian diatas adalah :

H1 : Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga.

#### **2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hubungan antara belanja pemerintah dan belanja daerah tercipta ketika pemerintah menggunakan belanja pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang menunjukkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan fasilitas layanan publik adalah ekonomi yang berkembang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah berhak untuk memungut pajak dan biaya tambahan dari masyarakat atas layanan yang diberikannya untuk mendorong kegiatan masyarakat dalam perekonomian. Akan membuat aktivitas. Adanya pemungutan pajak ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan PAD. Hasil survei Mayza (2015), Rani (2016) dan Devi (2019) menyebutkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Hipotesis kedua berdasarkan penjelasan di atas adalah :

H2 : Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga.



### **2.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Semakin banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan, semakin tinggi tingkat ekspansi. Ekspansi dipandang sebagai masalah keuangan karena mengurangi daya beli individu. Namun, tidak ada yang berubah, mengingat fakta bahwa upah asli bergantung pada efisiensi kerja yang kecil, dan ekspansi meningkatkan kompensasi. Dan ini tidak hanya meningkatkan keputusan pajak, tetapi juga berdampak positif pada pendapatan pemerintah daerah. Hasil survei Lestari (2016) dan Sari (2019) menyebutkan bahwa inflasi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hipotesis ketiga berdasarkan penjelasan di atas adalah :

H3 : Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga.

### **2.4.4 Pengaruh Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Semakin tinggi pendapatan yang tersedia untuk digunakan, tingkat ekspansi dan pembayaran daerah akan meningkat. Dan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pembayar pajak menjadi lebih sadar dan pendapatan daerah meningkat. Temuan Hendriani (2017) menggambarkan dampak pajak daerah, belanja pemerintah dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis keempat dari penjelasan tersebut adalah :

H4 : Pajak daerah, pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga.